

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pada keadaan saat ini, para pemilik bisnis diharuskan untuk bisa kompetitif saat mengembangkan usahanya. Dengan persaingan pasar yang sangat pesat mebuat Indonesia ikut mengembangkan laju perekonomiannya serta membuka lapangan pekerjaan untuk mengurangi jumlah angka pengangguran yang ada. Menurut Kusuma dan Lutfiany dalam jurnal AKUNIDA Vol. 4 No 2 (2018) Indonesia adalah negara agraris yang menitikberatkan pada perkembangan dan kemajuan keuangan menuju arah yang unggul di segala bidang modern, salah satunya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah membuat komitmen yang signifikan dan signifikan dalam memberikan pekerjaan dan gaji kepada individu. dari Indonesia. UMKM memiliki peran penting pada ekonomi negara yang menjadi dorongan pertama fundamental di perputaran keuangan publik

Hal yang serupa juga di ungkapkan oleh Rio F. Wirantara dan Susilawati (2016:7) UMKM merupakan sebuah sistem dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang di dalamnya adanya kegiatan atas individu atau pelaku usaha sebanyak mungkin atas dasar keahlian dan juga potensi. Kegiatan UMKM tentunya tidak akan jauh dari sebuah aktivitas akuntansi yang mana berperan sebagai informasi perkembangan serta kondisi keuangan dari UMKM, selain itu untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan atas perumusan yang ada di perusahaannya.

Sesuai Undang-Undang nomor 20 Tahun 2008 yang menyebutkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), UMKM ialah organisasi keuangan bermanfaat bersifat soliter, dilengkapi oleh orang-orang dan unsur-unsur usaha yang bukan merupakan pembantu atau bagian dari organisasi yang dimiliki, dikendalikan, atau menjadi esensial. baik secara langsung maupun implikasinya terhadap usaha kecil atau besar dengan mengatur jenis-jenis usaha yang diatur dengan undang-undang.

Menurut Syukirna (2018), UMKM memiliki peran signifikan untuk kemajuan keuangan di negara Indonesia, selain itu pelaku UMKM merupakan pemasok pilihan kebebasan bekerja untuk mengurangi pengangguran di Indonesia. Hal ini terbukti dari penambahan jumlah UMKM yang ada, penguatan wilayah setempat dan selanjutnya tingkat pengangguran yang ada saat ini juga akan semakin berkurang dan munculnya UMKM baru di suatu tempat.

Menurut Diajeng, Misrin dan Andrianto dalam jurnal *Balance* Vol.XVI No. 1 (2019) Permasalahan yang sering dialami oleh UMKM adalah permasalahan pencatatan pembukuan dan penyusunan keuangan yang diakibatkan oleh tidak adanya informasi tentang pencatatan pembukuan. Pada umumnya pelaku UMKM hanya melengkapi sistem pencatatan pembukuan yang cukup sederhana dan hanya menuliskan banyaknya barang dibeli dan dijual, banyaknya barang yang didapat dan buku harian barang diberikan serta kewajiban dan biaya yang dikeluarkan kemudian tanpa pencatatan sebagai per kerangka pembukuan yang sah. Sebuah bisnis besar atau usaha swasta tidak akan lepas dari masalah modal. Tidak terkecuali bagi daerah di Indonesia yang terkendala masalah permodalan sebagai peningkatan usaha dan lebih jauh lagi, baik masalah pembukuan atau administrasi keuangan pada UMKM.

Setiap organisasi diharuskan memiliki opsi untuk melakukan kerangka laporan keuangan yang layak untuk memberikan data yang dibutuhkan oleh bank. Hal ini tentunya memudahkan para pemilik UMKM untuk menentukan pilihan dan mengajukan permodalan yang diberikan oleh sektor keuangan saat ini.

Seperti yang diungkapkan oleh Safitri dan Sarifudin dalam buku harian Manajemen dan Inovasi Bisnis Vol. 5 no 2 (2018), sejujurnya, banyak pemilik UMKM yang tidak menuliskan pencatatan yang benar dan maksimal seperti sikap para pemilik UMKM yang merasa bahwa menerapkan pembukuan yang baik tentu akan menambah kerumitan pekerjaan mereka. Kami secara teratur mengalami pandangan ini karena tidak adanya perhatian dan pemahaman dan informasi tentang kerangka catatan pembukuan yang layak. Pengusaha UMKM harus memiliki pengaturan dan informasi yang baik tentang pembukuan yang ada karena ini sangat penting untuk bisnis, khususnya uang. Jika dalam sebuah bisnis, khususnya di UMKM, tidak memiliki sistem pencatatan pembukuan yang baik, hal ini juga bisa menjadi pemicu inkonsistensi moneter dalam sebuah UMKM. Hal ini juga menyebabkan sulitnya pelaku UMKM dalam melakukan kegiatan peminjaman modal pada pihak perbankan maupun kreditur yang di sebabkan tidak adanya pencatatan akuntansi yang ada, sementara pihak kreditur membutuhkan catatan keuangan yang ada pada UMKM tersebut guna memperkirakan apakah pelaku usaha tersebut dapat mengembalikan modal yang mereka pinjamkan atau tidak. Dengan adanya pencatatan akuntansi yang baik maka hal ini dapat memungkinkan pemilik mendapatkan informasi keuangan yang sistematis dan tersusun rapi.

Menurut Setyawati dan Hermawan dalam jurnal Riset akuntansi dan keuangan Indonesia Vol. 3 No. 2 (2018) mengatakan bahwa informasi

pembukuan pada pelaku UMKM hanyalah dasar yang mereka ketahui sampai tingkat sekolah terakhir mereka. Untuk kesiapan rangkuman keuangan, mereka hanya menyusunnya sebatas yang mereka ketahui tanpa memisahkannya ke dalam jenis laporan yang seharusnya dan sesuai dengan kerangka pencatatan pembukuan secara keseluruhan. Dari hal tersebut sosialisasi oleh pemerintah pada para pelaku UMKM masih belum cukup karena masih belum terlaksananya sistem pencatatan yang sesuai dengan seharusnya. Rendahnya pemahaman para pelaku UMKM tentang sistem pencatatan akuntansi yang ada juga di picu oleh persepsi para pelaku. Selain itu dengan majunya teknologi yang menyediakan banyak aplikasi yang dapat memudahkan pelaku masih belum cukup untuk membangun kesadaran serta pemahaman pemilik usaha untuk melakukan pencatatan akuntansi yang sesuai.

Menurut yang di sebutkan Mulyadi sistem akuntansi (2016:3) ialah pengorganisasian formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan dalam berbagai bentuk sebagai sarana penyediaan informasi data keuangan yang akan di gunakan oleh manajemen atau pelaku usaha untuk memudahkan pengelolaan keuangan yang ada di perusahaan. Sistem akuntansi yang baik akan mendukung kinerja manajerial perusahaan dalam mengambil keputusan di masa yang akan datang. .Adanya informasi – informasi tersebut memungkinkan UMKM dapat menentukan kinerja dan juga hasil yang sudah di jalani selama ini. Sistem pencatatan akuntansi adalah hal yang tidak boleh di lupakan oleh pelaku usaha.

Pada tahun 2016, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) telah diberikan Standar Akuntansi Keuangan Bagi Badan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM). SAK ini berhasil diberlakukan pada bulan Agustus 2016, penerbitan SAK ini mewajibkan pelaksanaan SAK yang lalu, khususnya Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

Pada tahun sebelum 2016, substansi UMKM bebas menggunakan SAK ETAP tetapi dikarenakan produktivitas dan kelayakan pemanfaatan pada unsur yang lebih sederhana, pemanfaatan SAK ETAP tidak material. Dengan demikian, SAK EMKM diberikan sebagai standar yang secara eksplisit mengatur pengungkapan moneter unsur-unsur UMKM. Oleh karena itu, untuk situasi seperti ini, diyakini para pelaku UMKM saat ini dapat membuat rekaman yang sesuai dengan data yang seharusnya di buat dalam keuangan, khususnya SAK EMKM.

Menurut Agung dan Ira dalam jurnal Aset vol. 20 no 2 (2018) SAK EMKM merupakan standar pembukuan yang siap mewajibkan pelaku UMKM untuk melakukan pembukuan secara tepat dan akurat. Tingkat sekolah serta pengetahuan. Besar kecilnya usaha dan lamanya berdirinya organisasi tidak berdampak pada pandangan pelaku bisnis dalam melakukan akuntansi dan secara umum akan berdampak pesimis. Hal ini juga mengingatkan bahwa pelaku UMKM pada umumnya perlu mengembangkan usahanya dan berusaha untuk tetap menjalankan usahanya daripada melakukan pembukuan yang baik dan benar. Hal itu juga di sebabkan karena pola pikir yang cenderung terfokus pada opini dimana pembukuan yang dilakukan dengan sederhana lebih menghemat waktu dibandingkan melakukan pembukuan yang seharusnya karena kurangnya pemahanan atas pengetahuan pencatatan akuntansi yang sesuai.

Untuk itu pemanfaatan SAK EMKM bisa berguna bagi para pemilik usaha untuk dapat menyelesaikan pelaporan sesuai SAK EMKM. Dilakukannya pencatatan yang baik, tentunya lebih mudah bagi pelaku usaha UMKM untuk mempertahankan usahanya, dan sebagai alasan untuk data jalannya usaha. Pentingnya pencatatan yang sah juga memudahkan pelaku bisnis untuk mendapatkan akses mudah ke aset baik untuk pendukung keuangan maupun untuk bank

UD. Pawon kue merupakan salah satu Usaha Kecil Menengah (UMKM) di Surabaya. Merupakan pelaku usaha makanan ringan yang dikenang sebagai oleh-oleh khas Surabaya. UD. Pawon kue memproduksi makanan ringan dan kue basah dengan kue khas yang menjadi menu utama adalah Almond Crispy Surabaya yang merupakan salah satu oleh-oleh khas dan juga di gemari oleh warga Surabaya maupun para wisatawan yang datang berkunjung ke Surabaya. UD. Pawon kue di kelola oleh ibu Choirul Mahpuduah yang juga merupakan salah satu wanita inspirasi dan pendiri pelopor kampung kue. Beliau memproduksi berbagai macam makanan kering maupun basah yang sudah lulus uji nutrisi dan juga halal. Produk andalan dari pawon kue ialah almond crispy yang memiliki 5 varian rasa yaitu original, cheese, coklat, greentea dan juga redvelved. Produk ini telah memasuki pasar dan juga outlet oleh oleh Surabaya seperti patata Surabaya, Amand brownie, Lapis kukus Surabaya. Selain itu produk juga dapat di temukan pada Hero supermarket, Transmart dan juga pesawat Citilink. UD. Pawon kue sendiri telah memasuki bisnis online seperti Go-Jek dan juga Shopee. Pemasaran almond dan juga produk kue yang lain saat ini juga sudah merambat pada ranah Ekspor ke beberapa negara yang ada seperti Hongkong dan Singapura.

UD. Pawon kue telah berdiri dari tahun 2013 hingga saat ini 2020, namun dalam pencatatan sistem akuntansi yang masih terbilang sederhana yang hanya mencatat kas keluar dan juga kas masuk. Sehingga belum adanya dan terlaksana nya sistem akuntansi yang sesuai pada UD.pawon kue. Penulis memiliki tujuan untuk dapat mengetahui sejauh mana pengetahuan dan pemahaman atas sistem pencatatan akuntansi pada UD.Pawon kue. Serta menganalisis faktor apa saja yang membuat tidak di laksanakan nya sistem pencatatan yang sesuai pada UMKM UD.Pawon kue. Serta kesesuaian dengan

SAK EMKM yang telah berlaku sebagai dasar pencatata para pelaku UMKM yang ada dan juga sudah di terapkannya atau tidak pencatatn sesuai dengan SAK EMKM pada UD. Pawon Kue sehingga berdasarkan tujuan dilakukannya observasi di atas maka penulis mengambil judul “Analisis pengetahuan Dan Pemahaman Atas Sistem pencatatan Akuntansi Serta Kesesuaian Dengan SAK EMKM Pada UD. Pawon kue”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Tingkat Pengetahuan dan Pemahaman atas Sistem Pencatan akuntansi pada UD.Pawon Kue?
2. Bagaimanakah sistem pencatatan akuntansi yang dilaksanakan pada UD.pawon Kue?
3. Apakah sistem pencatatan akuntansi pada UD.Pawon Kue telah sesuai dengan SAK EMKM?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan dan pemahaman atas sistem pencatatan akuntansi pada UD. Pawon Kue
2. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem pencatatan sistem akuntansi pada UD.Pawon kue
3. Untuk mengetahui apakah sistem pencatatan akuntansi yang ada pada UD. Pawon Kue telah sesuai dengan SAK EMKM.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Aspek Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau data tambahan bagi perguruan tinggi, guru, mahasiswa dan kepentingan perpustakaan sehubungan dengan dampak pemahaman dan informasi terhadap pelaksanaan arsip kerangka pembukuan.

2. Aspek pengembangan ilmu pengetahuan

Informasi ini diandalkan sebagai data tambahan untuk eksplorasi tambahan dalam menangani masalah yang diidentifikasi dengan dampak pemahaman dan informasi tentang pelaksanaan catatan kerangka pembukuan.

3. Aspek praktis

Eksplorasi ini diharapkan dapat menjadi tambahan data dan pemikiran dalam melaksanakan kerangka pembukuan bagi UKM yang akan digunakan dalam membedah dana bagi UKM dan selanjutnya menjadi kewenangan publik untuk mengevaluasi sejauh mana UKM memahami pembukuan yang sesuai.